



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

BAN PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Upaya United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East (UNRWA) dalam Membantu Pengungsi
Palestina Memperoleh Pendidikan tahun 2011-2015***

Skripsi

Oleh

Febby Rahmadani Wicaksono

2013330030

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

BAN PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Upaya United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East (UNRWA) dalam Membantu Pengungsi
Palestina Memperoleh Pendidikan tahun 2011-2015***

Oleh

Febby Rahmadani Wicaksono

2013330030

Pembimbing

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Drs., M.A., Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Febby Rahmadani Wicaksono
Nomor Pokok : 2013330030
Judul : Upaya *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* dalam Membantu Pengungsi Palestina Memperoleh Pendidikan tahun 2011-2015


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 18 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji

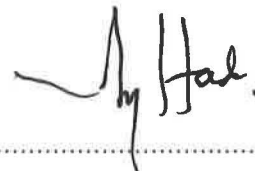
Ketua sidang merangkap anggota

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D


.....

Sekretaris

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Drs., M.A., Ph.D


.....

Anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D


.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febby Rahmadani Wicaksono
NPM : 2013330030
Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : *Upaya United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam Membantu Pengungsi Palestina Memperoleh Pendidikan tahun 2011-2015*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 1 Agustus 2017



Febby Rahmadani Wicaksono

ABSTRAK

Nama : Febby Rahmadani Wicaksono

NPM : 2013330030

Judul : Upaya *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam Membantu Pengungsi Palestina Memperoleh Pendidikan tahun 2011-2015

Enam dekade berlangsungnya konflik Israel-Palestina telah menyebabkan masalah pengungsi terbesar di dunia. Status mereka sebagai pengungsi di negara penerima telah menghambat perolehan mereka atas berbagai hak yang mendasar, termasuk hak berpendidikan. Maka organisasi internasional turut hadir untuk menangani masalah pengungsi Palestina. UNRWA didirikan sebagai organisasi di bawah PBB yang dikhususkan untuk membantu para pengungsi Palestina di Lebanon, Yordania, Suriah, Jalur Gaza, dan Tepi Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya UNRWA dalam membantu pengungsi Palestina memperoleh pendidikan. Sehingga rumusan pertanyaan untuk penelitian ini adalah: “Bagaimana upaya UNRWA dalam membantu pengungsi Palestina memperoleh pendidikan tahun 2011 sampai 2015?” Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teori neoliberal institusionalisme dan fungsi organisasi internasional.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah UNRWA berhasil membantu pengungsi Palestina memperoleh kebutuhan pendidikan mereka. Upaya-upaya yang dilakukan UNRWA antara lain: mengoperasikan sekolah, melatih guru, memberikan pendidikan darurat, memberi pelajaran sesuai kurikulum negara penerima, memberi pelajaran HAM dan toleransi, dan bekerja sama dengan negara penerima dan organisasi lainnya.

Kata kunci: Upaya, UNRWA, Pengungsi Palestina, Pendidikan

ABSTRACT

Name : Febby Rahmadani Wicaksono

NPM : 2013330030

Title : *The Effort of United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) in Helping Palestine Refugees to Get an Education year 2011-2015*

Six decades of ongoing Israel-Palestine conflict has cause the biggest refugee problem in the world. Their status as a refugee in host countries has denied their access to several basic rights, including access to education. Then international organization comes to handle Palestine refugees issue. UNRWA was established as an organization under United Nations specialized in helping Palestinian refugees in Lebanon, Jordan, Syria, Gaza Strip, and West Bank.

This research aims to describe UNRWA's effort in helping Palestine refugees to get an education. Thus, the research questions is: "How is the effort of UNRWA in helping Palestine refugees to get an education year 2011 untill 2015?" This research was done by using qualitative method and literature review. In answering the research question, the writer was using neoliberal institutionalism and international organization functions theory.

This research finds that UNRWA is success in helping Palestine refugees to achieve their education needs. The efforts which UNRWA has done are: operating schools, training teachers, giving education in emergencies, giving lessons with host countries curriculum, giving lessons about human rights and tolerance, and cooperating with host countries and other organizations.

Key words: *Effort, UNRWA, Palestine Refugees, Education*

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama aku ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang oleh-Nya aku diberikan kemampuan, kesehatan, dan kelancaran hingga terselesaikannya skripsi ini dan lulus tepat waktu.

Lalu pada orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung mendukung proses pembuatan skripsi ini:

- Untuk Mamah dan Papah. Atas semua dukungan baik moril maupun materiil. Ucapan terima kasih saja tidak cukup. Kuharap aku sanggup untuk selalu membuat kalian berdua bangga.
- Untuk anggota keluarga yang lain, Mamih, Om, Tante. Lalu sepupu-sepupuku, duh setelah lulus kuliah rasanya tua sendiri melihat kalian masih berseragam sekolah.
- Untuk Mas Bob. Terlepas dari kecanggunganmu tiap kali bimbingan, rasanya senang dapat bimbingan dari Mas. Mas adalah salah satu dosen favoritku, dimana kelas-kelasnya selalu menyenangkan dan kisah-kisahnyanya selalu kunantikan. Sehat selalu ya Mas!
- Untuk dosen-dosen pengujiku. Mbak Sylvi dan Mbak Nophie, yang menjadikan suasana sidang skripsiku santai. Terima kasih pula atas masukan-masukan dari Mbak.
- Untuk Mas Pur, dosenku di kelas seminar. Yang telah menuntunku dalam langkah awal penulisan skripsi.
- Untuk semua dosen HI Unpar. Terima kasih telah mengajarkan ilmu-ilmu yang kuharap berguna bagi masa depanku.
- Untuk teman-teman HI Unpar 2013. Mirdha, Elita, Arin, Kezia, Intan, Dini, Anna, Jaqualine, Eliana, dan Ira. Yang telah mewarnai 4 tahun kehidupan kampusku dan berjuang bersama-sama untuk lulus. Sukses untuk kita semua!

- Untuk Oky, mantan teman sebangku yang meski sekarang sudah beda kampus dan beda jurusan, mau direpotin sebagai *proof reader* skripsiku. Dan terima kasih sudah menjadi kawan yang selalu hadir.
- Untuk Rifa, Upeh, Wiwied, Umi, dan Salma. Yang karena berbeda almamater, kendala jarak, dan kesibukan masing-masing jadi jarang bertemu. Tapi selalu membuat kenangan manis tiap kali kumpul. Tiga dari enam sudah sarjana, ayo kutunggu sisanya menyusul!

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat dan kasih sayang-Nya yang selalu hadir, sehingga penulis dapat melalui proses pembuatan skripsi sampai selesai. Penelitian ini ditujukan sebagai pemenuhan syarat lulus jenjang sarjana. Penulis berharap penelitian ini membawa manfaat dalam memperkaya bidang keilmuan hubungan internasional.

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama bagi dosen pembimbing skripsi saya, Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Drs., M.A., Ph.D. yang senantiasa memberi kritik serta masukan demi penulisan penelitian yang baik. Juga untuk keluarga dan teman-teman atas dorongan dan bantuan yang diberikan.

Penelitian ini berjudul “Upaya *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam Membantu Pengungsi Palestina Memperoleh Pendidikan Tahun 2011-2015.” Menyadari bahwa karya tulis ini masih membutuhkan penyempurnaan, penulis membuka diri bagi kritik serta saran dari berbagai pihak guna penulisan yang lebih baik lagi.

Bandung, 1 Agustus 2017

Febby Rahmadani W.

DAFTAR ISI

Pernyataan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Singkatan.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah	9
1.2.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Kajian Terdahulu	11
1.5 Kerangka Pemikiran	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.1 Metode Penelitian.....	21
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	22
1.7 Sistematika Pembahasan	22
BAB II Konflik Israel-Palestina dan Dampaknya terhadap	
Akses Pendidikan Pengungsi Palestina	24
2.1 Sejarah Konflik Israel-Palestina	24

2.2 Kondisi Pengungsi Palestina.....	33
2.2.1 Kondisi Anak-anak Pengungsi Palestina	39
2.3 Hambatan Akses Pendidikan yang Dialami Anak-anak Pengungsi Palestina.....	40
2.3.1 Hambatan Akses Pendidikan di Lebanon.....	41
2.3.2 Hambatan Akses Pendidikan di Yordania.....	42
2.3.3 Hambatan Akses Pendidikan di Suriah.....	42
2.3.4 Hambatan Akses Pendidikan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.....	43

**BAB III *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees
in the Near East (UNRWA) sebagai Organisasi Bantuan***

bagi Pengungsi Palestina.....	47
3.1 Sejarah Pembentukan UNRWA.....	47
3.2 Visi, Misi dan Mandat UNRWA	48
3.2.1 Visi UNRWA.....	48
3.2.2 Misi UNRWA	49
3.2.3 Mandat UNRWA	49
3.3 Struktur Organisasi UNRWA	51
3.3.1 Komisaris Jenderal.....	52
3.3.2 Deputi Komisaris Jenderal	53
3.3.3 Komisi Penasehat.....	53
3.3.4 Markas Besar UNRWA	54
3.3.4.1 Kantor Komisaris Jenderal	55
3.3.5 Kantor Wilayah.....	56
3.3.6 Staf UNRWA	57
3.4 Aktivitas-Aktivitas UNRWA.....	57
3.4.1 Pendidikan	57
3.4.2 Kesehatan	58
3.4.3 Perlindungan	59
3.4.4 Layanan Bantuan dan Sosial.....	60
3.4.5 Keuangan Mikro	61

3.4.6	Infrastruktur dan Perkembangan Kamp	62
3.4.7	Tanggap Darurat Bencana	63
3.5	Pendanaan UNRWA	63
3.6	Kerjasama UNRWA dengan Aktor Lainnya	65
BAB IV	Upaya UNRWA dalam Memberikan Pendidikan Bagi	
	Pengungsi Palestina	68
4.1	Sekolah UNRWA.....	69
4.2	Pendidikan dalam Keadaan Darurat.....	76
4.3	Pelaksanaan Reformasi Pendidikan UNRWA (2011-2015).....	81
4.3.1	<i>Teacher Development</i>	83
4.3.2	<i>Inclusive Education</i>	86
4.3.3	<i>Technical and Vocational Training and Youth</i>	87
4.3.4	<i>Curriculum and Student Assessment</i>	88
4.4	Pendanaan Program Pendidikan UNRWA	91
4.5	Kerjasama UNRWA dengan Aktor Lainnya dalam	
	Memberikan Pendidikan Bagi Pengungsi Palestina	92
4.5.1	Kerjasama UNRWA dengan Negara Penerima	92
4.5.2	Kerjasama UNRWA dengan UNESCO.....	93
4.5.3	Kerjasama UNRWA dengan <i>Norwegian Refugee</i>	
	<i>Council (NRC)</i>	93
BAB V	Simpulan	97
	Daftar Pustaka.....	101

DAFTAR SINGKATAN

EiE	: <i>Education in Emergencies</i>
ERS	: <i>Education Reform Strategy</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRCRT	: <i>Human Rights, Conflict Resolution and Tolerance</i>
IDP	: <i>Internally Displaced Person</i>
IGO	: <i>Intergovernmental organization</i>
IoE	: <i>Institute of Education</i>
MLA	: <i>Monitoring Learning Achievements</i>
NGO	: <i>Non-governmental Organization</i>
NRC	: <i>Norwegian Refugee Council</i>
oPt	: <i>occupied Palestinian territories</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLO	: <i>Palestine Liberation Organization</i>
PNA	: <i>Palestinian National Authority</i>
TVET	: <i>Technical Vocational Education and Training</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational Scientific and Cultural Organization</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNRWA	: <i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i>
VTC	: <i>Vocational Training Centre</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rencana Pembagian Palestina oleh PBB tahun 1947.....	28
Gambar 2.2 Rute Migrasi Pengungsi Palestina pada saat Nakba tahun 1948..	31
Gambar 2.3 Kamp Husn di Yordania.....	35
Gambar 2.4 Sekolah UNRWA di Gaza yang Hancur	44
Gambar 2.5 Sekolah UNRWA yang Beralih Fungsi Menjadi Tempat Perindungan Sementara.....	46
Gambar 4.1 Sekolah Dasar UNRWA di Kamp Beach tahun 2012.....	72
Gambar 4.2 Kegiatan Pelatihan di <i>Damascus Training Centre</i>	74
Gambar 4.3 Modul SBTD.....	84
Gambar 4.4 Modul <i>Leading for the Future</i>	85
Gambar 4.5 <i>HRCRT Toolkit</i>	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengungsi Palestina 1948 yang Terdaftar, Januari 2016	34
Tabel 4.1 Statistik VTCs UNRWA tahun 2009/2010.....	75

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi UNRWA	51
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dijamin dan dilindungi untuk semua orang. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang telah ia miliki sejak lahir. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang karena ia adalah seorang manusia¹ dan sifatnya melekat bagi semua orang tanpa membedakan mereka melalui kebangsaan, jenis kelamin, etnis, warna kulit, agama, bahasa, maupun status yang lainnya.² Hak asasi manusia dalam dunia kontemporer telah diakui secara universal, baik oleh individu maupun kelompok. Negara-negara telah menyatakan bahwa mereka menerima dan mematuhi norma internasional mengenai hak asasi, dengan diadopsinya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948.³

Negara mempunyai kewajiban dan tugas di bawah hukum internasional untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi HAM warga negaranya. Kewajiban untuk menghormati memiliki pengertian bahwa negara harus menahan diri dari mengganggu atau membatasi pemenuhan warga negaranya atas hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi berarti negara wajib untuk melindungi

¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (New York: Cornell University Press, 2013), hal. 7.

² "What Are Human Rights," *OHCHR*, diakses pada 15 Oktober 2016, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatAreHumanRights.aspx>.

³ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 2nd ed. (New York: Cornell University Press, 2003), hal. 33.

warga negaranya agar tidak dilanggar haknya. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi artinya negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak dasar manusia.⁴

Masalah pemenuhan HAM, berikut juga dengan masalah-masalah lain seperti isu kesehatan, masalah senjata pemusnah massal, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, meningkatnya globalisasi ekonomi, hingga perubahan iklim, tidak bisa diselesaikan oleh tindakan suatu negara sendirian, meskipun oleh negara *superpower* seperti Amerika Serikat. Dibutuhkan kerjasama antar pemerintah dan aktor non negara serta partisipasi aktif masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya kebutuhan akan pembentukan suatu mekanisme internasional.⁵

Organisasi internasional pun menjadi penting perannya dalam menghadapi permasalahan global. PBB merupakan organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat universal dan memiliki tujuan dan aktivitas yang bersifat umum. Dalam menjalankan tugasnya, PBB mempunyai lima organ utama dan dibawah sistem PBB terdapat banyak badan dan organisasi yang memiliki tugas masing-masing. Misalnya UNHCR dan UNRWA yang dikhususkan bagi pengungsi, UNICEF bagi hak-hak anak, ILO, UNESCO, WHO, dan lain-lain.

Hak untuk berpendidikan telah diakui oleh masyarakat internasional di berbagai instrumen hukum seperti traktat (konvensi, piagam, perjanjian) dan juga pada *soft law* seperti rekomendasi, deklarasi, dan kerangka kerja.⁶ Isu mengenai hak berpendidikan mulai banyak diangkat oleh tingkat internasional dan regional

⁴ "What Are Human Rights," *OHCHR, op.cit.*

⁵ Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (USA: Lynne Rienner Publisher, 2010), hal. 1.

⁶ "International Law," *Right to Education Project*, diakses pada 15 Oktober 2016, <http://www.right-to-education.org/page/international-law>.

terutama semenjak tahun 1948 ketika Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) diadopsi oleh Majelis Umum PBB di Paris, yang tertuang pada Pasal 26. Berikut ini adalah bunyi UDHR Pasal 26 ayat 1 dan 2:⁷

1. Semua orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Hak berpendidikan juga diatur pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang tertuang dalam Pasal 28 dan 29. Sedangkan hak berpendidikan bagi para pengungsi secara khusus diatur dalam *Convention Relating to the Status of Refugees* yang dibuat di Jenewa pada 28 Juli 1951 dan protokolnya pada 1967 dalam Pasal 22 mengenai pendidikan umum. Konvensi ini berlaku terhadap orang-orang yang termasuk kedalam definisi pengungsi pada Pasal 1A Konvensi, yaitu seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia kembali

⁷ UNGA, *Universal Declaration of Human Rights*, 217 (III) A (Paris, 1948), diakses pada 15 Oktober 2016, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf.

ke Negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar karena adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.⁸

Namun ada pengecualian bagi pengungsi yang diatur kedalam pasal 1D dalam Konvensi yang terdiri dari dua paragraf. Paragraf pertama menyatakan bahwa Konvensi tidak akan berlaku bagi orang-orang yang menerima perlindungan atau bantuan dari organ-organ atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Sehingga Konvensi hanya berlaku bagi pengungsi yang ditangani oleh UNHCR dan negara penerima yang telah meratifikasi Konvensi, dan tidak berlaku terhadap pengungsi Palestina. Karena perlindungan hak bagi pengungsi Palestina telah dimandatkan kepada badan PBB selain UNHCR yaitu *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA). Meskipun begitu, pengungsi Palestina yang tidak terdaftar oleh UNRWA dan berada di luar kelima wilayah kerja UNRWA, diinterpretasikan oleh UNHCR termasuk kedalam pengungsi yang haknya dijamin dalam Konvensi dan masuk ke perlingkungannya.

UNRWA adalah organisasi yang dibentuk sebagai *subsidiary organ* PBB melalui *United Nations General Assembly Resolution 302 (IV)* pada Desember 1949. UNRWA dibentuk PBB untuk menanggapi akibat pecahnya perang Israel-Palestina pada tahun 1948 yang menyebabkan banyak warga Palestina yang terpaksa mengungsi. UNRWA mulai berfungsi sejak tahun 1950 dan

⁸ Kata Pengantar oleh Komisariat Tinggi UNHCR dalam *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*, diadopsi pada 28 Juli 1951, hal. 3, diakses pada 15 Oktober 2016, <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10>.

melaksanakan mandatnya untuk memberikan pendidikan, kesehatan, layanan bantuan dan sosial, mikrofinansial, serta infrastruktur dan perkembangan kamp bagi para pengungsi pada lima wilayah operasi yaitu Lebanon, Yordania, Suriah, Jalur Gaza, dan Tepi Barat.

Pendidikan merupakan salah satu hal yang fundamental bagi UNRWA, dan program pendidikan merupakan yang terbesar diantara program UNRWA lainnya. UNRWA telah bekerja selama lebih dari 60 tahun untuk menjamin hak anak-anak pengungsi Palestina agar bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Selama ini banyak dari pengungsi Palestina mengandalkan sekolah UNRWA untuk pendidikan mereka. Salah satu tujuan UNRWA, berdasarkan komitmennya untuk *human development* bagi pengungsi Palestina adalah untuk membantu anak-anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penyediaan sekolah dasar.⁹

1.2. Identifikasi Masalah

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan salah satu masalah di dunia yang tak kunjung usai dan telah menyebabkan sejumlah besar warga Palestina menjadi pengungsi untuk waktu yang lama. Masalah yang terjadi akibat konflik tersebut adalah pengungsi Palestina mengalami hambatan dalam memperoleh berbagai hak mereka, termasuk juga hak berpendidikan.

Konflik bermula ketika Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour pada 1917 bahwa Inggris menjanjikan tanah Palestina sebagai kampung halaman bagi

⁹ "What We Do: Education," UNRWA, diakses pada 25 September 2016, <http://www.unrwa.org/what-we-do/education>.

bangsa Yahudi, yang kemudian dianggap Zionis bisa menjadi langkah mereka untuk mendirikan negara merdeka di tanah Palestina. Lalu terjadi beberapa peristiwa yang menyebabkan gelombang pengungsi Palestina. Diperkirakan sebanyak 150.000 warga Palestina yang mengungsi keluar batas negara saat dikeluarkannya mandat Inggris pada tahun 1922 hingga saat Majelis Umum PBB mengeluarkan rekomendasi untuk membagi Palestina menjadi dua negara pada tahun 1947.

Kemudian diikuti perang pertama Israel-Arab yang diingat oleh warga Palestina sebagai Nakba. Sehingga di antara akhir tahun 1947 hingga pertengahan 1949 terjadi arus pengungsi Palestina sebanyak 750.000 orang. Dan dari sekitar 150.000 orang Palestina yang masih tinggal di wilayah Palestina yang telah menjadi wilayah negara Israel pada 14 Mei 1948, sebanyak 30.000 menjadi berstatus *internally displaced persons* (IDPs). Pengungsi Palestina bertambah lagi di antara tahun 1949 hingga 1967 dengan perkiraan sebanyak 400.000 orang ketika terjadi perang Israel-Arab pada 1967.¹⁰

Pengungsi Palestina menghadapi hambatan yang besar dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas, dengan krisis keamanan, konflik bersenjata, kekacauan regional, maupun tantangan sosial untuk dapat memperoleh pendidikan. Banyak dari mereka yang bahkan didiskriminasi atau diperlakukan tidak sama dengan warga negara di negara penerima.

Terdapat beberapa faktor yang menghalangi pengungsi Palestina untuk memperoleh pendidikan. Di beberapa negara akses pengungsi kepada fasilitas

¹⁰ BADIL, *Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons* (2003), (Al Ayyam, 2004), hal. 2-4, diakses pada 26 September 2016, http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/Survey-2003.pdf.

umum dibatasi oleh pemerintah negara tersebut. Misalnya di Lebanon, akses pengungsi Palestina ke pendidikan menengah dan yang lebih tinggi dibatasi. Keadaan sosial seperti ketiadaan biaya juga menghalangi pengungsi Palestina untuk bisa mengakses pendidikan.

Konflik yang terjadi di wilayah tinggal mereka juga mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan. Misalnya saat perang sipil dan invasi Israel di Lebanon tahun 1980an, banyak anak-anak pengungsi Palestina yang tidak bisa bersekolah selama satu tahun. Di *oPt* (*occupied Palestinian territories*), mereka juga kehilangan waktu bersekolah 35 sampai 50 persen saat *Intifada* pertama. Dan keadaan di Suriah juga mempengaruhi kesempatan bersekolah para pengungsi Palestina karena masalah keamanan membuat mereka tidak bisa keluar rumah.¹¹

OCHA (*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) melaporkan bahwa Israel mempraktikkan aktivitas-aktivitas yang merenggut perolehan hak dari warga Palestina. Aktivitas tersebut meliputi: membatasi akses ke pasar dan lahan peternakan; melarang akses ke infrastruktur dasar, pelayanan, dan sumber daya; penolakan izin bangunan dan secara signifikan memodifikasi perencanaan hukum yang berlaku; penghancuran dan ancaman penghancuran rumah, sekolah, dan penampungan hewan.¹² Otoritas Palestina pun terbatas kemampuannya dalam melindungi hak pengungsi Palestina akibat kependudukan Israel.¹³

¹¹ *Ibid.*, hal. 20-21.

¹² "Bedouin Communities at Risk of Forcible Transfer," OCHA, (Jerusalem, September 2014), diakses pada 17 Oktober 2016, https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_english.pdf.

¹³ "The Gaza Strip: Status under International Humanitarian Law," Diakonia, (Diakonia IHL Resource Centre, September 2014), diakses pada 17 Oktober 2016, <http://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl---briefs/status-of-the-gaza-strip-final.30.9.2014.pdf>.

Kegagalan negara-negara untuk melindungi hak pengungsi Palestina menjadikan kewajiban tersebut jatuh kepada negara penerima atau komunitas internasional yang telah dimandatkan untuk mengambil peran untuk melindungi pengungsi Palestina.¹⁴ Pada waktu *Convention Relating to the Status of Refugees* diadopsi, pengungsi Palestina sudah dilindungi oleh perlindungan internasional dan rezim bantuan yang dibentuk bagi mereka yaitu *United Nations Conciliation Commission for Palestine* (UNCCP) dan UNRWA.

Namun sayangnya, dikarenakan pengungsi Palestina sudah menerima perlindungan dari badan selain UNHCR, mereka menjadi tidak termasuk kedalam kategori pengungsi yang haknya dijamin oleh Konvensi bagi pengungsi tersebut. Hal itu menjadikan mereka tidak mendapat perlindungan atas hak mereka sebesar yang diterima oleh pengungsi-pengungsi lainnya di dunia. Hal ini dikenal juga dengan istilah '*protection gap*' karena bertentangan dengan objektif rezim yang dirancang untuk pengungsi pada tahun 1949 tersebut.¹⁵

Dengan adanya hambatan dalam mengakses pendidikan yang dialami pengungsi Palestina, UNRWA menjadi andalan para pengungsi Palestina sebagai organisasi yang mengupayakan agar para pengungsi Palestina bisa memperoleh pendidikan. Selama 60 tahun UNRWA menjalankan program pendidikan bagi anak-anak pengungsi Palestina dan berusaha memberikan pendidikan yang berkualitas dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat serta organisasi lain.

¹⁴ BADIL, *Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons (2003)*, *op.cit.*, hal. 62.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 59.

Namun meskipun UNRWA tengah mengusahakan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak pengungsi Palestina melalui program-program pendidikannya, UNRWA pun mengalami hambatan. Di antaranya adalah, konflik bersenjata yang terjadi di lingkungan pengungsi, misal di Jalur Gaza yang berakibat pada hancurnya bangunan-bangunan sekolah UNRWA. Selain akibat konflik, program-program UNRWA tidak dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan saat ini UNRWA mengalami keterbatasan dana. Hal ini tak dapat dihindari karena UNRWA mengandalkan dana sukarela yang hampir seluruhnya diperoleh dari pendonor.

Maka penulis ingin mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan UNRWA dalam bidang pendidikan bagi anak-anak pengungsi Palestina sehingga hak berpendidikan mereka dapat terjamin.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang dan identifikasi masalah, penulis ingin mengetahui bagaimana peran aktor selain negara dalam memberikan bantuan bagi suatu kelompok tertentu. Pembahasan dalam penelitian ini akan melihat kepada upaya UNRWA sebagai sebuah organisasi PBB yang dibentuk bagi pengungsi Palestina pada salah satu mandat kerjanya untuk membantu pengungsi Palestina dalam bidang pendidikan. Pemilihan bidang pendidikan sebagai fokus penelitian disebabkan karena pendidikan merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup para pengungsi Palestina. Dengan pendidikan, pengungsi Palestina dibekali ilmu dan kemampuan sehingga mereka dapat bertahan hidup secara mandiri dengan

bekerja. Selain itu, pendidikan merupakan program terbesar dari program-program UNRWA yang lain.

Penelitian ini dibatasi kepada aktivitas UNRWA terhadap anak-anak pengungsi Palestina. Sedangkan wilayah yang diteliti adalah semua wilayah kerja UNRWA yang berjumlah lima antara lain Negara Lebanon, Yordania, Suriah, Jalur Gaza dan Tepi Barat. Selain itu penelitian akan difokuskan pada rentang waktu selama empat tahun yaitu tahun 2011 hingga 2015. Karena pada rentang tahun tersebut UNRWA mengimplementasikan sebuah *Education Reform Strategy*.

1.2.2. Perumusan Masalah

Maka perumusan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana upaya *United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam membantu pengungsi Palestina memperoleh pendidikan tahun 2011 sampai 2015?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya yang dilakukan UNRWA dalam membantu pengungsi Palestina di Lebanon, Yordania, Suriah, Jalur Gaza, dan Tepi Barat memperoleh pendidikan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis atas kegunaan penelitian ini adalah agar bisa dijadikan sumber bahan bacaan dan acuan bagi yang tertarik untuk membahas atau sekadar tertarik untuk mengetahui perihal organisasi internasional dan isu pengungsi, terutama UNRWA. Karena penulis menemukan bahwa ketersediaan referensi perihal UNRWA masih sangat jarang.

Maka harapan penulis, semoga dengan disusunnya penelitian ini akan menjadi sumbangan bagi kepentingan praktis maupun teoritis bagi keilmuan hubungan internasional.

1.4. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu atau tinjauan pustaka bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁶ Maka penulis telah meninjau sebanyak tiga buah penelitian sebelumnya yang dianggap memiliki kemiripan dengan topik penelitian. Diharapkan dapat memperlihatkan pentingnya penelitian ini serta dapat menuntun penulis dalam proses penelitian. Rujukan penelitian yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama adalah skripsi S1 dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada yang ditulis oleh Elna Susanta Mariarti. Skripsi yang terbit tahun 2016 tersebut berjudul ‘Peranan UNRWA dalam Penanganan

¹⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (USA: SAGE Publications, 2014), hal. 40.

Pengungsi Palestina di Lebanon Dilihat dari Perspektif Keamanan Manusia'.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk melihat keoptimalan kinerja UNRWA dalam membantu pengungsi Palestina untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak dan sejahtera. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan tujuh aspek *human security*. Hasil penelitiannya adalah bahwa peranan UNRWA dalam menangani masalah pengungsi Palestina di Lebanon menunjukkan adanya kinerja yang belum optimal dan yang sudah optimal dilihat dari dimensi *human security* khususnya ketahanan keamanan pangan, kesehatan, dan ekonomi.

Meski sama-sama melihat peran UNRWA, namun skripsi yang penulis susun berfokus pada bidang pendidikan saja dan tidak terbatas pada satu negara saja melainkan pada tiga negara serta *oPt*. Serta menganalisa upaya UNRWA tersebut dengan menggunakan teori fungsi organisasi internasional.

Penelitian kedua ditulis oleh Ronald Sultana pada Jurnal *World Studies in Education* yang artikelnya berjudul '*Palestinian Refugee Children and Education: Challenges for UNRWA*'.¹⁸ Tulisan tersebut bermaksud untuk melihat kualitas pendidikan yang diberikan UNRWA di lima wilayah operasinya. Penelitian dilakukan menggunakan definisi UNESCO mengenai pendidikan berkualitas. Hasil penelitiannya adalah ternyata sekolah UNRWA mengalami ketertinggalan apabila dibandingkan dengan kualitas sekolah di negara penerima.

¹⁷ Elna Susanta Mariarti, "Peranan UNRWA dalam Penanganan Pengungsi Palestina di Lebanon Dilihat dari Perspektif Keamanan Manusia" (Skripsi S1, Universitas Gadjah Mada, 2016).

¹⁸ Ronald Sultana, "Palestinian Refugee Children and Education: Challenges for UNRWA," *World Studies in Education* 8, no. 2 (1 Januari 2007), diakses pada 17 Oktober 2016, https://www.researchgate.net/publication/44840462_Palestinian_Refugee_Children_and_Education_Challenges_for_UNRWA.

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan melihat upaya UNRWA dalam menjalankan perannya untuk membantu pengungsi Palestina memperoleh pendidikan, terutama ditinjau pada *Education Reform Strategy* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diimplementasikan oleh UNRWA pada 2011-2015.

Penelitian yang ketiga adalah kajian mengenai keberhasilan salah satu program UNRWA yang dilakukan oleh Ozlem Eskiocak Oguzertem dan Paul McAdams pada 2015. Tulisan mereka yang berjudul '*Human Rights, Conflict Resolution, and Tolerance Education: UNRWA Experience from the Field*'¹⁹ membahas bahwa program HRCRT yang dimulai dari tahun 2000 perlu diperbaharui agar selaras dengan *Education Reform Strategy* (2011-2015) dan standar internasional sehingga dapat memenuhi visi UNRWA. Maka kebijakan HRCRT dikembangkan melalui pengalaman UNRWA mengenai pendidikan HAM sebelumnya serta mengikuti *best practices* dari kerangka kerja *World Programme for Human Rights Education* (WPHRE, 2005-hingga sekarang). WPHRE memberi contoh bahwa ada empat komponen yang membuat implementasi pendidikan HAM di sekolah berhasil: *teaching and learning*, *teacher preparation* dan *professional development*, *learning development*, dan *monitoring and evaluation*. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa dengan mengikuti standar internasional serta *best practices*, UNRWA berhasil

¹⁹ Ozlem E. Oguzertem dan Paul McAdams, "Human Rights, Conflict Resolution, and Tolerance Education: UNRWA Experience from the Field," *Human Rights Education in Asia-Pacific* 6, (2015), hal. 59-84, diakses pada 17 Oktober 2016, <http://www.hurights.or.jp/archives/asia-pacific/section1/7%20UNRWA%20Experience.pdf>.

menjalankan program pendidikan HAMnya di kelima wilayah operasinya di Timur Tengah.

Penulis menyadari bahwa meski masih memiliki kekurangan, namun bagi pengungsi Palestina, UNRWA merupakan organisasi yang mereka andalkan dalam kehidupan. Pendidikan merupakan program terbesar di UNRWA dan baru tahun 2011 kemarin organisasi tersebut mengimplementasikan sebuah Reformasi Pendidikan yang berakhir pada 2015 sebagai upayanya untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik. Sehingga penulis merasa bahwa mengkaji hal tersebut menjadi penting.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu susunan argumentasi yang mendukung landasan teori-teori maupun konsep-konsep yang dipergunakan dalam sebuah studi penelitian. Dengan teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, kerangka pemikiran akan menuntun dan mempermudah peneliti dalam membangun hipotesis yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian.²⁰ Sedangkan yang dimaksud sebagai teori adalah konstruksi intelektual (konsep-konsep) yang membantu kita dalam menjelaskan atau memprediksi penelitian kita—menginterpretasikan fakta-fakta dan mengidentifikasi hal-hal yang terjadi secara reguler dan berulang-ulang dalam fenomena yang sedang

²⁰ Richard A. Swanson, *Theory Building in Applied Disciplines*, (San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2013), diakses pada 17 Oktober 2016, <http://libguides.usc.edu/writingguide/theoreticalframework>.

diteliti.²¹ Teori menjadi kerangka kerja untuk keseluruhan penelitian yang nantinya berfungsi mengorganisasi rumusan masalah dan hipotesis penelitian serta prosedur pengumpulan data.²²

Maka untuk menjawab pertanyaan penelitian, akan dijelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang mendukung proses penelitian ini. Teori hubungan internasional yang dipakai untuk membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah adalah neoliberal institusionalisme dan fungsi organisasi internasional. Serta akan dijelaskan pula konsep organisasi internasional dan pengungsi.

Neoliberal institusionalisme merupakan teori ilmu hubungan internasional yang mulai muncul pada tahun 1970-an dan disebarluaskan melalui karya-karya Robert O. Keohane, Joseph Nye, Stephen Krasner, dll. Teori ini muncul karena pada masa itu terjadi peningkatan jumlah institusi internasional yang beragam.

Oleh Robert Keohane dan Joseph Nye pada tahun 1970an, pemikiran ini berkembang ketika tingkat interdependensi antar negara-negara Barat dan Jepang hubungannya kuat dan kompleks, dan koneksi yang terjalin bentuknya bisa dalam hubungan politik antar pemerintah, termasuk juga hubungan transnasional antar korporasi bisnis. Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara biasanya akan membangun kerjasama melalui pembentukan institusi internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Institusi ini

²¹ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics*, 5th ed. (USA: Pearson, 2013), hal. 27.

²² John W. Creswell, *op.cit.*, hal. 81.

mempromosikan jalinan kerja sama yang sifatnya melewati batas negara dengan ketersediaan informasi dan kemampuannya untuk menekan biaya operasional.²³

Neoliberal menurut Keohane dan Nye dalam *Power and Interdependence*, memandang bahwa kerjasama internasional dapat tercapai dengan kondisi *mutual interdependence* dari adanya hubungan antar negara yang saling melakukan beragam transaksi sosial dan ekonomi. Interdependensi pada politik internasional merujuk pada situasi yang menunjukkan efek timbal-balik antar negara-negara dan antar aktor-aktor di negara yang berbeda.²⁴

Neoliberal memiliki ide-ide yang sama dengan liberal klasik mengenai kemungkinan akan progres dan perubahan,²⁵ meskipun tidak seoptimis pendahulunya yang percaya bahwa organisasi internasional, terutama Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dapat mengubah keadaan dunia yang seperti ‘rimba’ menjadi ‘kebun binatang’. Namun neoliberal meyakini bahwa institusi internasional bisa membuat kerjasama antar negara menjadi lebih mudah pelaksanaannya,²⁶ karena organisasi internasional dan rezim internasional dapat memfasilitasi kerjasama dengan membentuk suatu kerangka organisasional mengenai aturan-aturan prosedur dan mekanisme *collective sanctions*.²⁷

²³ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories & Approaches*, 4th ed. (New York: Oxford University Press, 2010), hal. 43.

²⁴ Thomas Diez, Ingvild Bode, dan Aleksandra Fernandes Da Costa, *Key Concepts in International Relations* (London: SAGE Publications, 2011), hal. 132.

²⁵ Jackson dan Sorensen, *op.cit.*, hal. 42.

²⁶ *Ibid.*, hal. 106.

²⁷ Thomas Diez, *op.cit.*, hal. 132.

Institusi internasional menurut Keohane adalah sekumpulan aturan baik formal maupun informal yang mengatur peran kebiasaan, membatasi aktivitas, dan mewujudkan harapan. Institusi internasional dibagi menjadi tiga bentuk:²⁸

1. Organisasi internasional formal baik *Intergovernmental (IGOs)* atau *Cross-national* maupun *non-governmental (NGOs)*: yaitu sebuah entitas yang secara sengaja dibentuk dan mempunyai birokrasi organisasi, aturan-aturan dan misi yang eksplisit. Contohnya adalah PBB.
2. Rezim internasional: yaitu aturan-aturan yang disetujui oleh pemerintah negara untuk menangani suatu isu. Contohnya seperti rezim *Nuclear Non-Proliferation*, yang dibuat untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, rezim Perubahan Iklim, yang bertujuan untuk menghentikan perubahan iklim dengan menurunkan gas rumah kaca ke level rendah yang tidak membahayakan bagi sistem iklim global, juga rezim Hak Asasi Manusia yang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.²⁹ Organisasi dan rezim internasional bisa saja berbarengan, seperti *World Trade Organization (WTO)* yang membentuk rezim perdagangan. Namun bisa juga sebuah rezim dibentuk tanpa organisasi, seperti mengenai Hukum Laut.³⁰
3. Konvensi: adalah institusi informal dengan aturan-aturan dan pemahaman yang implisit. Pemahaman yang implisit ini membuat aktor-aktor

²⁸ Paul R. Viotti dan Mark K. Kauppi, *International Relations Theory*, 4th ed. (Pearson, 2010), hal. 133.

²⁹ Thomas Diez, *op.cit.*, hal. 115.

³⁰ Jackson dan Sorensen, *op.cit.*, hal. 106.

memahami satu sama lain sehingga dapat mengkoordinasikan tingkah laku mereka. Contohnya adalah resiprositas.

Dalam menjalankan perannya, organisasi internasional memiliki sejumlah fungsi antara lain:³¹

1. *Informational*, yaitu mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan data informasi.
2. *Forum*, yaitu menyediakan tempat atau sebagai wadah bagi negara anggota untuk saling bertukar pandangan serta membuat keputusan.
3. *Normative*, yaitu menentukan standar perilaku bagi negara anggota.
4. *Rule creation*, yaitu merencanakan perjanjian untuk disepakati para anggotanya dan sifatnya mengikat.
5. *Rule supervision*, yaitu memonitor jalannya peraturan, mengadili sengketa, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan penegakan aturan.
6. *Operational*, yaitu mengalokasikan sumber daya yang ada dan memberikan bantuan teknis.

Untuk dapat melakukan analisis mengenai upaya UNRWA dalam membantu anak-anak pengungsi Palestina memperoleh pendidikan, selain memahami teori yang dipergunakan dalam penelitian, kita juga perlu untuk mengetahui konsep-konsep yang dipergunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya dapat diartikan sebagai sekumpulan usaha atau cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan tujuan organisasi internasional

³¹ Karns dan Mingst, *op.cit.*, hal. 9.

menurut Clive Archer adalah untuk mencapai keinginan bersama para negara anggotanya.³²

Organisasi internasional merupakan salah satu bentuk dari institusi internasional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang keanggotaannya terdiri dari setidaknya tiga negara yang memiliki aktivitas diantara anggotanya, serta memiliki landasan perjanjian internasional yang formal.³³ Sedangkan menurut Clive Archer definisi organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan persetujuan para anggotanya, baik dari perwakilan pemerintah atau bukan, dari setidaknya dua negara berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan seluruh anggotanya.³⁴

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan menurut tujuan dan aktivitasnya. Yaitu organisasi internasional dengan tujuan umum (misalnya PBB) dan organisasi internasional dengan tujuan khusus (misalnya OPEC).³⁵ Sedangkan melalui keanggotaannya, organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi organisasi yang anggotanya terdiri atas negara-negara atau pemerintah suatu negara (*IGOs/intergovernmental organizations*) dan organisasi internasional yang anggotanya adalah non-pemerintah dari suatu negara (*NGOs/non-governmental organizations* atau *INGOs/international non governmental organizations*).³⁶

³² Clive Archer, *International Organizations*, (London: George Allen & Unwin Publishing Ltd., 1983), hal. 33.

³³ Karns dan Mingst, *op.cit.*, hal. 2.

³⁴ Clive Archer, *op. cit.*, hal. 35.

³⁵ *Ibid.*, hal. 52.

³⁶ *Ibid.*, hal. 35-36.

Keanggotaan organisasi tidak hanya berdasarkan kedekatan wilayah geografis saja seperti ASEAN dan Uni Eropa. Namun ada juga yang terdiri dari negara-negara anggota lintas kawasan seperti OKI. Meskipun begitu, banyak dari IGO adalah organisasi yang anggotanya berada dalam satu kawasan karena dengan wilayah yang berdekatan dan biasanya antar negara tersebut memiliki kesamaan kepentingan nasional sehingga menjadi motivasi mereka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Banyak pula IGO yang beranggotakan sedikit negara dan memiliki tujuan yang spesifik.³⁷

Organisasi UNRWA yang menjadi bahasan penelitian, merupakan IGO yang keanggotaannya universal karena terdiri dari negara-negara dari kawasan yang berbeda, dan mempunyai tujuan dan aktivitas yang spesifik yaitu memberi bantuan bagi pengungsi Palestina.

Mengingat objek penelitian skripsi ini adalah pengungsi, maka perlu diketahui bahwa konsep pengungsi dapat diartikan dengan merujuk kepada definisi yang dijelaskan di Pasal 1A *Convention Relating to the Status of Refugees* tahun 1951. Menurut pasal tersebut, pengungsi adalah seseorang yang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan adanya persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutannya tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa

³⁷ Karns dan Mingst, *op.cit.*, hal. 7.

termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.³⁸

Sedangkan untuk memahami pengungsi Palestina, terdapat dua istilah yaitu: (1) *Palestine refugees*, didefinisikan UNRWA sebagai orang-orang yang tempat tinggal asalnya berada di Palestina pada kurun waktu 1 Juni 1946 hingga 15 Mei 1948, dan kehilangan baik rumah maupun mata pencaharian sebagai akibat dari konflik tahun 1948³⁹; dan (2) *Palestinian refugees*, yaitu semua orang Palestina yang menjadi *externally displaced*, termasuk di dalamnya adalah pengungsi dari konflik tahun 1948, diluar wilayah yang menjadi Israel, dan juga pengungsi akibat konflik 1967, diluar wilayah *oPt (occupied Palestinian territories)*.⁴⁰

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis sebagai langkah-langkah untuk menjawab penelitian adalah metode kualitatif. Metode ini dipakai untuk mendeskripsikan upaya UNRWA dalam membantu pengungsi Palestina memperoleh pendidikan.

Yang dimaksud metode kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau

³⁸ *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, op.cit.*, hal. 14.

³⁹ Lance Bartholomeusz, "The Mandate of UNRWA at Sixty," *Refugee Survey Quarterly* 28 (2010): 457, diakses pada 17 Oktober 2016, <http://www.unrwa.org/userfiles/201006109246.pdf>.

⁴⁰ Elna Sondergaard, *Closing Protection Gaps: Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States Signatories to the 1951 Refugee Convention*, 1st ed. (Al Ayyam, 2005), hal. XXVIII, diakses pada 26 September 2016, http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/Handbook.pdf.

sekelompok orang, dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya seperti menganalisis data dan menafsirkan makna data.⁴¹ Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan penjelasan atau pemahaman dari suatu fenomena sosial.⁴²

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder, yang diperoleh dari studi literatur berupa dokumen resmi, buku, artikel, jurnal, laporan, maupun sumber-sumber lainnya yang relevan dengan bahasan penelitian. Sumber-sumber yang digunakan tersebut dapat berbentuk fisik maupun digital yang dapat diakses melalui internet.

1.7. Sistematika Pembahasan

Demi laporan penelitian yang sistematis, penelitian akan dibagi menjadi lima bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi pendahuluan penelitian yang terdiri dari; latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

⁴¹ John W. Creswell, *op.cit.*, hal. 6.

⁴² Jane Ritchie dan Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (London: Sage Publication, 2003), hal. 5.

BAB II KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKSES PENDIDIKAN PENGUNGSI PALESTINA

Pada Bab kedua dijelaskan mengenai latar belakang konflik Israel-Palestina yang menyebabkan kebanyakan orang Palestina menjadi pengungsi. Dijelaskan juga mengenai dampaknya terhadap kondisi anak-anak pengungsi Palestina yang mengalami hambatan pada perolehan hak berpendidikan mereka di Lebanon, Yordania, Suriah, Jalur Gaza, dan Tepi Barat.

BAB III *UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST* (UNRWA) SEBAGAI ORGANISASI BANTUAN BAGI PENGUNGSI PALESTINA

Pada bab ketiga dijelaskan mengenai profil UNRWA yang terdiri dari; sejarah organisasi UNRWA, mandat kerja, struktur organisasi, aktivitas, pendanaan, dan kerjasama UNRWA dengan aktor lainnya.

BAB IV UPAYA UNRWA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN BAGI PENGUNGSI PALESTINA

Pada bab keempat merupakan hasil analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai upaya UNRWA dalam memberikan pendidikan bagi pengungsi Palestina di Lebanon, Yordania, Suriah, Jalur Gaza, dan Tepi Barat.

BAB V SIMPULAN

Bab terakhir berisi simpulan yang diperoleh setelah menjawab pertanyaan penelitian.